



**DINAS PERUMAHAN RAKYAT
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



**RENSTRA
(RENCANA STRATEGIS)
2017-2021**



**VISI DAN MISI
RPJMD
TAHUN 2016-2021**

VISI:

**“TERWUJUDNYA
MASYARAKAT KABUPATEN
PESISIR SELATAN YANG
MANDIRI, UNGGUL, AGAMIS
DAN SEJAHTERA”**



MISI

1. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah.
3. Mewujudkan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan mengembangkan nilai-nilai budaya ABS-SBK.
4. Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan yang berkelanjutan.
5. Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obat terlarang.



TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan berada pada Misi 2 RPJMD yaitu “*Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah*”, yang mana tujuan yang hendak dicapai dalam misi 2 ini adalah:

Mewujudkan pembangunan infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial dalam mendukung sektor unggulan daerah.



Sasarannya:

- a. Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur ekonomi secara berkelanjutan.
- b. Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur sosial.



TUJUAN DAN SASARAN

STARTEGIS

DINAS PERUMAHAN RAKYAT

KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Tujuan 1:

Terwujudnya infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.

Sasaran 1.1: Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni

1.2: Meningkatkan kawasan permukiman yang tertata

1.3: Meningkatkan prasarana sarana utilitas (PSU) Perumahan umum



TUJUAN DAN SASARAN STARTEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Tujuan 2:

*Terwujudnya ketersediaan lahan
untuk pembangunan yang
memiliki legalitas*

Sasaran 2.1: Terwujudnya ketersediaan
lahan untuk
pembangunan



CASCADING
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN

[Cas Cading Perkimtan.xls](#)

TERIMA KASIH

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Tujuan	Sasaran	KODE		Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Capaian Awal tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi	
		Prog.	Keg.				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Capaian Kinerja Akhir Periode				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
				Program	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi perkantoran															
				Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya pembayaran rekening listrik, telp, air dan lain-	100%	100%	100.000.000	100%	76.900.000	100%	80.000.000	100%	80.000.000	100%	80.000.000	100%	416.900.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
					Penyediaan Jasa administrasi Keuangan	Terlaksananya pembayaran honor dan operasional pengelola keuangan	100%	100%	190.000.000	100%	281.600.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	1.221.600.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya pembayaran jasa kebersihan kantor dan tersediaany peralatan dan bahan kebersihan	100%	100%	100.000.000	100%	75.688.800	100%	76.000.000	100%	76.000.000	100%	76.000.000	100%	403.688.800	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
					Penyediaan Alat tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	100%	100%	35.000.000	100%	28.703.600	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	153.703.600	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100%	100%	30.000.000	100%	37.157.700	100%	40.000.000	100%	45.000.000	100%	50.000.000	100%	202.157.700	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan	100%	100%	10.000.000	100%	11.690.500	100%	12.000.000	100%	12.000.000	100%	12.000.000	100%	57.690.500	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	700.000.000	100%	172.240.000							872.240.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat, harian dan tamu	100%	100%	55.000.000	100%	35.000.000	100%	35.000.000	100%	35.000.000	100%	35.000.000	100%	195.000.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
					Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	100%	100%	170.000.000	100%	137.600.000	100%	150.000.000	100%	160.000.000	100%	170.000.000	100%	787.600.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
					Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	100%	100%	150.000.000	100%	73.700.000	100%	75.000.000	100%	80.000.000	100%	85.000.000	100%	463.700.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
					Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	100%				100%	52.000.000	100%	52.000.000	100%	65.000.000	100%	169.000.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
					Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan kerja	Terlaksananya perawatan peralatan kerja	100%				100%	10.000.000	100%	11.000.000	100%	12.000.000	100%	33.000.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
					Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan	Dokumen perencanaan dan pelaporan yang dihasilkan	100%				100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	225.000.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
Terwujudnya Infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan						Persentase Infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan															
	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni					Rasio Rumah Layak Huni		####		####		####		####		####		####			
				Program:	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase jumlah rumah dinas aparatur dalam kondisi baik															
				Kegiatan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	100%	100%	50.000.000	100%	84.770.000	100%	85.000.000	100%	95.000.000	100%	105.000.000	100%	419.770.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung	100%	100%	50.000.000	100%	18.775.000	100%	19.000.000	100%	19.000.000	100%	19.000.000	100%	125.775.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	100%	100%	150.000.000	100%	200.000.000	100%	210.000.000	100%	220.000.000	100%	230.000.000	100%	1.010.000.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
					Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	100%				100%	200.000.000	100%	220.000.000	100%	240.000.000	100%	660.000.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
					Pengadaan Mobilier	Tersedianya Pengadaan Mobilier	100%	100%	140.000.000	100%	54.080.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	374.080.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
					Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	100%	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	500.000.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
					Pengadaan Peralatan Gedung kantor	Tersedianya Pengadaan Peralatan Gedung kantor	100%				100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	300.000.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
					Peningkatan Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang ditingkatkan	100%	100%	150.000.000	100%	200.000.000							350.000.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
					Pembangunan Rumah Dinas	Jumlah Pembangunan Rumah Dinas	100%	100%	800.000.000	100%	807.087.500							1.607.087.500	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan		

Tujuan	Sasaran	KODE		Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Capaian Awal tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi	
		Prog.	Keg.				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Capaian Kinerja Akhir Periode				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
					Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	100%	100%	500.000.000	100%	527.000.000						1.027.000.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan			
					Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Pembangunan Gedung Kantor	100%	100%	500.000.000	100%	450.000.000						950.000.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan			
				Program:	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah rumah dinas yang dibangun dan terpelihara											-				
				Kegiatan	Peningkatan Gedung Kantor	Jumlah Peningkatan Gedung Kantor	100%				100%	205.000.000	100%	210.000.000	100%	215.000.000	100%	630.000.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
					Pembangunan Rumah Dinas	Jumlah Pembangunan Rumah Dinas	100%				100%	2.500.000.000	100%	29.000.000.000	100%	29.000.000.000	100%	60.500.000.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
					Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	100%				100%	600.000.000	100%	1.200.000.000	100%	1.800.000.000	100%	3.600.000.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
					Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Pembangunan Gedung Kantor	100%				100%	2.500.000.000	100%	2.750.000.000	100%	3.000.000.000	100%	8.250.000.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
					Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	100%				100%	600.000.000	100%	800.000.000	100%	1.000.000.000	100%	2.400.000.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
				Program:	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase kebutuhan pakaian dinas dan hari-hari tertentu											-				
				Kegiatan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas	100%	100%	25.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	185.000.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
					Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	100%	100%	20.000.000	100%	20.000.000						40.000.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan			
				Program:	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pelaksanaan pendidikan dan pelatihan											-				
				Kegiatan	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Persentase pelaksanaan pendidikan dan pelatihan formal	100%	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	280.000.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
				Program:	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan												-				
				Kegiatan	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah laporan dan monitoring yang dilakukan	100%	100%	70.000.000	100%	94.449.500	100%	95.000.000	100%	100.000.000	100%	110.000.000	100%	469.449.500	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
					Penyusunan Perencanaan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan anggaran	100%	100%	30.000.000	100%	60.000.000						90.000.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan			
					Monitoring dan evaluasi Penataan Kawasan Permukiman	Terlaksananya monitoring dan evaluasi kawasan permukiman	100%	100%	100.000.000	100%	43.547.800	100%	45.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	288.547.800	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
					Monitoring dan evaluasi Kegiatan Perumahan	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi Kegiatan Perumahan	100%	100%	100.000.000	100%	50.297.800						150.297.800	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan			
					Sinkronisasi Program RPIJM Cipta Karya	Terlaksananya Sinkronisasi Program RPIJM Cipta Karya	100%	100%	50.000.000	100%	53.378.800	100%	60.000.000	100%	70.000.000	100%	80.000.000	100%	313.378.800	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
				Program:	Pengembangan Perumahan												-				
				Kegiatan	Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat kurang Mampu	Terlaksananya Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat kurang Mampu	100%	20%	750.000.000	20%	775.000.000	20%	800.000.000	20%	825.000.000	20%	850.000.000	20%	4.000.000.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
					Pematangan Lahan Lokasi Rumah Tapak	Jumlah Pematangan Lahan Lokasi Rumah Tapak	100%	20%	500.000.000	20%	650.000.000	20%	800.000.000	20%	950.000.000	20%	1.100.000.000	20%	4.000.000.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
					Penunjang Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan kegiatan Rumah tidak layak huni	Tersedianya Penunjang Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan kegiatan Rumah tidak layak huni	100%	20%	150.000.000	20%	200.000.000	20%	250.000.000	20%	300.000.000	20%	350.000.000	20%	1.250.000.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
					Pendampingan Perbaikan Rumah Tidak Layak huni	Terlaksananya Pendampingan Perbaikan Rumah Tidak Layak huni	100%	20%	150.000.000	20%	200.000.000	20%	250.000.000	20%	300.000.000	20%	350.000.000	20%	1.250.000.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
					Pengembangan Permukiman Skala Kawasan	Terlaksananya Pengembangan Permukiman Skala Kawasan	100%	20%	1.000.000.000	20%	1.100.000.000	20%	1.200.000.000	20%	1.300.000.000	20%	1.400.000.000	20%	6.000.000.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
					Penyusunan Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Pesisir Selatan	Tersedianya Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Pesisir Selatan	100%			100%	880.000.000						880.000.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan			
					Penunjang Perumahan Permukiman dan BSPS	Tersedianya Penunjang Perumahan Permukiman dan BSPS	100%	100%	80.000.000	100%	168.816.400	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	848.816.400	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
					Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	100%	20%	600.000.000	20%	4.246.674.500	20%	5.000.000.000	20%	5.000.000.000	20%	5.000.000.000	20%	19.846.674.500	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	

Tujuan	Sasaran	KODE		Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Capaian Awal tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi
		Prog.	Keg.				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Capaian Kinerja Akhir Periode			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
					Bantuan Jamban (WC)	Jumlah Bantuan Jamban (WC)	100%	20%	375.000.000	20%	3.000.000.000						3.375.000.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
					Penunjang Kegiatan Pendataan dan Perencanaan Perumahan	Tersedianya Penunjang Kegiatan Pendataan dan Perencanaan Perumahan	100%			100%	62.098.400	100%	80.000.000	100%	80.000.000	100%	80.000.000	302.098.400	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
					Penunjang Kegiatan Penyediaan dan Pelaksanaan Perumahan	Tersedianya Penunjang Kegiatan Penyediaan dan Pelaksanaan Perumahan	100%			100%	80.672.000	100%	80.000.000	100%	80.000.000	100%	80.000.000	320.672.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
					Pembangunan Rumah Khusus Nelayan	Terlaksananya Pembangunan Rumah Khusus Nelayan	100%	100%	8.000.000.000	100%	8.000.000.000	100%	8.000.000.000	100%	8.000.000.000	100%	8.000.000.000	40.000.000.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
					Sosialisasi Program Kegiatan Bantuan Perumahan	Jumlah Sosialisasi Program Kegiatan Bantuan Perumahan	100%			100%	50.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	500.000.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
					Pendataan dan Validasi Data Rumah Tidak Layak Huni	Terlaksananya Pendataan dan Validasi Data Rumah Tidak Layak Huni	100%	100%	60.650.650	100%	61.007.900	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	1.621.658.550	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
					Feseability Study Rumah Khusus Nelayan	Tersedianya Feseability Study Rumah Khusus Nelayan	100%	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	250.000.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
					Penetapan Kebijakan, strategi dan program perumahan	Tersedianya Penetapan Kebijakan, strategi dan program perumahan	100%	100%	50.000.000	100%	55.000.000	100%	60.000.000	100%	65.000.000	100%	70.000.000	300.000.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
					Penyusunan norma, Standar, Pedoman dan Manual	Tersedianya norma, Standar, Pedoman dan Manual	100%	100%	50.000.000	100%	55.000.000	100%	60.000.000	100%	65.000.000	100%	70.000.000	300.000.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
					Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan perumahan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan perumahan	100%	100%	50.000.000	100%	55.000.000	100%	60.000.000	100%	65.000.000	100%	70.000.000	300.000.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
					Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan di Bidang perumahan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan di Bidang perumahan	100%	100%	50.000.000	100%	55.000.000	100%	60.000.000	100%	65.000.000	100%	70.000.000	300.000.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
					Koordinasi Pembangunan Perumahan dengan lembaga/ Badan Usaha	Terlaksananya Koordinasi Pembangunan Perumahan dengan lembaga/ Badan Usaha	100%	100%	50.000.000	100%	55.000.000	100%	60.000.000	100%	65.000.000	100%	70.000.000	300.000.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Tersedianya Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	100%	100%	200.000.000	100%	210.000.000	100%	220.000.000	100%	230.000.000	100%	240.000.000	1.100.000.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
					Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	100%	100%	20.000.000	100%	25.000.000	100%	30.000.000	100%	35.000.000	100%	40.000.000	150.000.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
					Penunjang Pembangunan Rumah Khusus Nelayan	Tersedianya Penunjang Pembangunan Rumah Khusus	100%					100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	300.000.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
					DAK Perumahan	Jumlah RTLH dan backlog yang dibangun DAK Perumahan	100%			100%	1.016.944.000	100%	1.016.944.000	100%	1.016.944.000	100%	1.016.944.000	4.067.776.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
					Penunjang DAK Perumahan	Tersedianya Penunjang DAK Perumahan	100%					100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	300.000.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
					Penyusunan database Perumahan Permukiman	Tersedianya database Perumahan Permukiman	100%			100%	500.000.000						500.000.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
					Pembangunan jalan Minapolitan Mandeh Lanjutan	Panjang jalan minapolitan yang terbangun	100%	100%	200.000.000	100%	210.000.000						410.000.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
				Program:	Pemberdayaan Komunitas Perumahan												-			
				Kegiatan	Fasilitasi Pemberian Kredit Mikro Untuk Pembangunan dan Perbaikan Perumahan		100%	100%	100.000.000	100%	110.000.000	100%	120.000.000	100%	130.000.000	100%	140.000.000	600.000.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
					Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat		100%	100%	50.000.000	100%	55.000.000	100%	60.000.000	100%	65.000.000	100%	70.000.000	300.000.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
					Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan Perumahan		100%	100%	50.000.000	100%	55.000.000	100%	60.000.000	100%	65.000.000	100%	70.000.000	300.000.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
					Peningkatan Sistem Pemberian Kredit Pemilikan Rumah		100%	100%	50.000.000	100%	55.000.000	100%	60.000.000	100%	65.000.000	100%	70.000.000	300.000.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
					Sosialisasi dan Fasilitasi Jaminan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum		100%	100%	50.000.000	100%	55.000.000	100%	60.000.000	100%	65.000.000	100%	70.000.000	300.000.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	

Tujuan	Sasaran	KODE		Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Capaian Awal tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi
		Prog.	Keg.				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Capaian Kinerja Akhir Periode			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
					Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Peraturan Perundang - Undangan Bidang Perumahan	100%	100%	50.000.000	100%	55.000.000	100%	60.000.000	100%	65.000.000	100%	70.000.000	100%	300.000.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
					Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan kegiatan	100%					100%	50.000.000	100%	60.000.000	100%	70.000.000	100%	180.000.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
				Program:	Pengembangan Pemasaran Pariwisata													-		
				Kegiatan:	Pelaksanaan Promosi dan Publikasi	100%	100%	15.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	45.000.000	100%	50.000.000	100%	190.000.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
	Meningkatnya kawasan permukiman layak huni dan berkelanjutan																			
				Program:	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan													-		
				Kegiatan:	Pembangunan jaringan Air Bersih/Air Minum	100%	100%	400.000.000									100%	400.000.000		
				Program:	Lingkungan Sehat Perumahan													-		
				Kegiatan:	Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin	100%	20%	750.000.000	20%	1.375.000.000	20%	1.375.000.000	20%	1.375.000.000	20%	1.375.000.000	20%	6.250.000.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
					Rencana Pencegahan dan Peningkatan kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP)	100%			100%	855.750.000								855.750.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
					Penetapan Kebijakan dan Strategis Penyelenggaraan Keresarasan Kawasan dan Lingkungan Hunian Berimbang	100%	100%	50.000.000	100%	60.000.000	100%	70.000.000	100%	80.000.000	100%	90.000.000	100%	350.000.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
					Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Tentang Pembangunan kawasan Permukiman	100%	100%	50.000.000	100%	46.037.500	100%	50.000.000	100%	60.000.000	100%	70.000.000	100%	276.037.500	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
					Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaa Kebijakan Tentang Pembangunan Perumahan	100%					100%	50.000.000	100%	60.000.000	100%	70.000.000	100%	180.000.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
					Penyuluhan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Sehat Perumahan	100%	100%	50.000.000	100%	55.000.000	100%	60.000.000	100%	65.000.000	100%	70.000.000	100%	300.000.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
					Pengendalian Dampak Resiko Pencemaran Lingkungan	100%	100%	50.000.000	100%	55.000.000	100%	60.000.000	100%	65.000.000	100%	70.000.000	100%	300.000.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
					Pembangunan Infrastruktur Sanitasi	100%			100%	2.865.000.000	100%	5.000.000.000	100%	5.000.000.000	100%	5.000.000.000	100%	17.865.000.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
					Penunjang Pembangunan Infrastruktur Sanitasi	100%			100%	229.600.000	100%	229.600.000	100%	229.600.000	100%	229.600.000	100%	918.400.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
					Penunjang Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan kawasan permukiman	100%	100%	80.000.000	100%	80.000.000	100%	80.000.000	100%	80.000.000	100%	80.000.000	100%	400.000.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
					Peningkatan PSU (Prasarana dan Sarana Utilitas Umum)	100%	100%	2.000.000.000	100%	2.000.000.000	100%	2.000.000.000	100%	2.000.000.000	100%	2.000.000.000	100%	10.000.000.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
				Program:	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah													-		
				Kegiatan:	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	100%	100%	200.000.000	100%	220.000.000	100%	230.000.000	100%	240.000.000	100%	250.000.000	100%	1.140.000.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	

Tujuan	Sasaran	KODE		Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Capaian Awal tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi	
		Prog.	Keg.				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Capaian Kinerja Akhir Periode				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah	TersedianyaSarana dan Prasarana Air Limbah		100%	200.000.000	100%	220.000.000	100%	230.000.000	100%	240.000.000	100%	250.000.000	100%	1.140.000.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
					Pengembangan Teknologi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah	TersedianyaPengembangan Teknologi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah		100%	200.000.000	100%	220.000.000	100%	230.000.000	100%	240.000.000	100%	250.000.000	100%	1.140.000.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
					Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum	TersedianyaPengembangan Sistem Distribusi Air Minum		100%	200.000.000	100%	220.000.000	100%	230.000.000	100%	240.000.000	100%	250.000.000	100%	1.140.000.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
				Program:	Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong	Panjang saluran drainase/gorong-gorong lingkungan													-		
				kegiatan	Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Kawasan Permukiman	Panjang saluran drainase yang di bangun	100%			20%	5.000.000.000	20%	6.000.000.000	20%	7.000.000.000	20%	22.000.000.000	20%	40.000.000.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
					Pemeliharaan Drainase Kawasan	Panjang saluran drainase yang terpelihara	100%	100%	500.000.000	200%	500.000.000	20%	700.000.000	20%	800.000.000	20%	900.000.000	20%	3.400.000.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
					Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	100%	100%	100.000.000	100%	110.000.000	100%	120.000.000	100%	130.000.000	100%	140.000.000	100%	600.000.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
					Pembangunan Drainase (DAK)	Panjang saluran darianse yang terbangun	100%	100%	1.000.000.000	200%	1.000.000.000	20%	1.500.000.000	20%	1.500.000.000	20%	1.500.000.000	20%	6.500.000.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
				Program:	Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh														-		
				kegiatan	Perencanaan Pengembangan Infrastruktur	Jumlah dokumen perencanaan Pengembangan infrastruktur	100%	100%	100.000.000	100%	110.000.000	100%	120.000.000	100%	130.000.000	100%	140.000.000	100%	600.000.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
					Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur	Terlaksananya pembangunan atau peningkatan infrastruktur	100%	100%	1.000.000.000	100%	1.100.000.000	100%	1.200.000.000	100%	1.300.000.000	100%	1.400.000.000	100%	6.000.000.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
					Penyusunan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Kawasan Permukiman	Tersedianya Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Kawasan Permukiman	100%	100%	50.000.000	100%	50.000.000							100.000.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
					Penyusunan data Base Kawasan Permukiman	Tersedianya data Base Kawasan Permukiman	100%			100%	500.000.000							500.000.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
				Program:	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Panjang pembangunan jalan lingkungan													-		
				kegiatan	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan	Panjang jalan lingkung yang terbangun	100%					20%	600.000.000	20%	800.000.000	20%	1.000.000.000	20%	2.400.000.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
					Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkungan	Jumlah dokumen perencanaan jalan lingkung	100%	100%	200.000.000	100%	210.000.000	100%	220.000.000	100%	230.000.000	100%	240.000.000	100%	1.100.000.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
					Pembangunan jalan Minapolitan Mandeh Lanjutan	panjang jalan minapolitan yang terbangun	100%					100%	220.000.000	100%	230.000.000	100%	240.000.000	100%	690.000.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
				Program:	Pembangunan Sistem Informasi/ Data Base Jalan dan Jembatan	Tersedianya Sistem Informasi Data Base Jalan													-		
				kegiatan	Penyusunan Sistem Informasi/ Data Base Jalan Lingkung	Tersedianya Sistem Informasi Data Base Jalan Lingkung	100%	100%		100%			100%	150.000.000	100%		100%	150.000.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
				Program:	Pembangunan Infrastruktur Perdesaan														-		
				kegiatan	Peningkatan fasilitas Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman	Terlaksananya Peningkatan fasilitas Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman	100%	20%	500.000.000	20%	600.000.000							1.100.000.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
					Sosialisasi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan	Jumalh sosialisasi	100%			25%	50.000.000							50.000.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
					Penataan Kawasan Kumuh	Berkurangnya luasa kawasan kumuh	100%	20%	1.250.000.000	20%	3.200.000.000							4.450.000.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
					Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan	Panjang jalan lingkungan yang terbangun	100%			100%	200.000.000							200.000.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
					Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan tentang Pembangunan Kawasan Permukiman	Terlaksananya Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan tentang Pembangunan Kawasan Permukiman	100%			100%	50.000.000							50.000.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan		

Tujuan	Sasaran	KODE		Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Capaian Awal tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi
		Prog.	Keg.				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Capaian Kinerja Akhir Periode			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
				Program:	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah dokumen perencanaan kawasan permukiman dan Persentase penurunan luasan kawasan kumuh														
				kegiatan	Peningkatan fasilitas Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman	Terlaksananya Peningkatan fasilitas Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman	100%				20%	300.000.000	20%	300.000.000	20%	300.000.000	20%	900.000.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
					Pemeliharaan Jalan Kawasan	Panjang jalan kawasan yang terpelihara	100%				20%	600.000.000	20%	700.000.000	20%	800.000.000	20%	2.100.000.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
					Sosialisasi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan	Jumah sosialisasi	100%				25%	115.000.000	25%	130.000.000	25%	145.000.000	25%	390.000.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
					Penataan Kawasan Kumuh	Berkurangnya luas kawasan kumuh	100%				20%	3.000.000.000	20%	18.000.000.000	20%	18.000.000.000	20%	39.000.000.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
					Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Tentang Pembangunan Kawasan	Terlaksananya Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Tentang Pembangunan Kawasan	100%				100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	300.000.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
					Penyusunan DED Kawasan Kumuh Prioritas Dokumen RP2KPKP	Tersedianya DED Kawasan Kumuh Prioritas Dokumen RP2KPKP	100%				100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	100%	4.500.000.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
					Penunjang Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Tersedianya Penunjang Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	100%				100%	100.000.000	100%	110.000.000	100%	120.000.000	100%	330.000.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
					Penyusunan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Kawasan Permukiman	Tersedianya Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Kawasan Permukiman	100%				100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	150.000.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
					Penyusunan Dokumen Lingkungan Kawasan Kumuh	Tersedianya Dokumen Lingkungan Kawasan kumuh	100%				100%	800.000.000	100%	800.000.000	100%	800.000.000	100%	2.400.000.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
					Penunjang pemanfaatan dan pengendalian kawasan Permukiman	Tersedianya Penunjang pemanfaatan dan pengendalian kawasan Permukiman	100%				100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	300.000.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
Terwujudnya tertib administrasi dan tata kelola						Persentase data base pertanahan yang valid														
	Terwujudnya kepastian hukum pemilikan tanah di Kabupaten Pesisir Selatan					Persentase luas lahan yang bersertifikat														
				Program:	Penataan Penguasaan Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Tersedianya dokumen perencanaan pengadaan tanah														
				Kegiatan:	Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan															
					Perencanaan Pengadaan Tanah	Jumlah dokumen perencanaan pengadaan tanah	100%	100%	100%	90.000.000	100%	110.000.000	100%	115.000.000	100%	120.000.000		539.995.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
					Persiapan Pengadaan Tanah	Tersedianya peta bidang pengadaan tanah	100%	100%	100%	90.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000		490.000.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
					Pelaksanaan Pengadaan Tanah	Tersedianya tanah untuk pembangunan	100%	100%	100%	15.300.000.000	100%	10.262.000.000	100%	15.000.000.000	100%	15.000.000.000		70.562.000.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
					Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah	Tersedianya Sertifikat tanah	100%	100%	100%	110.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000		510.000.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
					Pengadaan Pilar Batas Tanah	Jumlah pilar batas tanah	100%	100%	100%	70.000.000								70.000.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
					Fasilitasi Pengadaan Tanah	Jumlah fasilitasi pengadaan tanah	100%		100%	94.600.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	844.600.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
					Sosialisasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Jumlah sosialisasi	100%	100%	100%	180.000.000	100%	185.000.000	100%	190.000.000	100%	195.000.000	100%	930.000.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
					Sertikasi Tanah Hak milik Pemerintah Daerah	Jumlah sertifikat tanah milik pemerintah daerah yang dihasilkan	100%		100%	150.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	750.000.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
					Bimbingan Teknis Pertanahan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis pertanahan	100%				100%	70.000.000	100%	80.000.000	100%	90.000.000	100%	240.000.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	

Tujuan	Sasaran	KODE		Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Capaian Awal tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi	
		Prog.	Keg.				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Capaian Kinerja Akhir Periode				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
					Penyuluhan Hukum Pertanahan	Jumlah penyuluhan hukum pertanahan	100%					100%	70.000.000	100%	80.000.000	100%	90.000.000	100%	240.000.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
					Inventarisasi Tanah Pemerintah Daerah	Tersedianya monitoring dan evaluasi aset tanah pemma	100%	100%	175.500.000	100%	175.500.000	100%	175.500.000	100%	175.500.000	100%	877.500.000		Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
				Program:	Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Tersedianya pengembangan sistem informasi pertanahan												-			
				Kegiatan:	Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan yang Handal	Tersedianya Sistem Informasi Pertanahan yang Handal	100%				100%	300.000.000					100%	300.000.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
				Program:	Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah	Tersedianya Sistem Pendaftaran tanah												-			
				Kegiatan:	Penyusunan Sistem Pendaftaran Tanah	Tersedianya Sistem Pendaftaran Tanah	100%						100%	115.000.000			100%	115.000.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
					Sosialisasi Sistem Pendaftaran Tanah	Jumlah sosialisasi	100%						100%	80.000.000			100%	80.000.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
				Program:	Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Persentase Penyelesaian konflik pertanahan milik pemma												-			
				Kegiatan:	Fasilitasi Penyelesaian Konflik - Konflik Pertanahan	Jumlah penyelesaian konflik pertanahan	100%	100%	65.000.000	100%	94.550.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	459.550.000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan		

Painan, Juni 2018

Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Pesisir Selatan


MUKHRIDAL, SH
NIP. 19640128 199309 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis Satuan Kerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah dokumen perencanaan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra-Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Renstra Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2017-2021 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menjabarkan Arah, Kebijakan, Program, Kegiatan, Visi, dan Misi Bupati terpilih dipadukan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan sehingga ada keterpaduan dengan arah kebijakan Pembangunan Daerah untuk jangka waktu lima tahunan kedepan.

Renstra Kabupaten Pesisir Selatan menekankan bahwa pembangunan dan pengelolaan prasarana harus diselenggarakan secara efektif dan efisien sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi, stabilitas Daerah dan Nasional serta upaya pemerataan dan penyebaran pembangunan. Dalam proses pembangunan dewasa ini, ketersediaan prasarana yang memadai sangat dibutuhkan selain melaksanakan pembangunan sebagai akibat dari pertumbuhan wilayah, upaya pemeliharaan ini berakibat diperlukannya sejumlah dana terus bertambah karena biaya untuk material dan tenaga kerja makin meningkat setiap tahunnya. Untuk melaksanakan pemeliharaan yang efisien perlu terus dilakukan sehingga keterbatasan biaya yang ada tidak akan memperburuk kondisi prasarana dan tetap membantu keandalan fungsi prasarana yang ada. Oleh karena itu perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) untuk mengoptimalkan fungsi pelayanan dibidang

fisik prasarana dengan pendanaan yang terbatas serta memperhatikan skala prioritas. Prasarana dengan kondisi mantap akan memberikan pelayanan yang cepat, tepat waktu dan aman untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, dan mampu berperan sebagai katalisator serta memberikan kontribusi yang nyata untuk terciptanya stabilitas. Disamping mengacu kepada arahan dan kebijaksanaan yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan, Renstra Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan ini juga mempedomani Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Renstra Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat, sehingga didapatkan daftar kebutuhan prioritas pembangunan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Penyusunan dokumen Renstra ini diharapkan dapat memberikan hasil yang signifikan terhadap penentuan arah dan kebijakan strategis dan konstruktif untuk pelaksanaan program pemenuhan sarana dan prasarana umum secara simultan selama periode Renstra tahun 2017 – 2021.

I.2 LANDASAN HUKUM

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Lingkungan daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Jis Undang – Undang Drt Nomor 21 tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77), jo Undang – Undang Nomor 58 tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015

- tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58., Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah , Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
 12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 - 2025;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 - 2032;

14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005 - 2025;
16. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 -2021
17. Peraturan Daerah No 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 - 2030
18. Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan perangkat Daerah
19. Peraturan Pemerintah Pekerjaan Umum No 02/PRT/M/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2015 -2019
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 55 Tahun 2016 yang berisi tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 - 2021 adalah merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Rencana Strategis Kabupaten Pesisir Selatan. Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017-2021 yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan. Didalam Rencana Strategis ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan memiliki maksud sebagai tuntunan dan Pengarah Program Pelaksanaan tugas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sebagai penjabaran lebih rinci dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021
2. Sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah tentang upaya – upaya Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan dalam peningkatan infrastruktur selama kurun waktu lima tahun kedepan.
3. Sebagai bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan (eksekutif dan legislatif) dalam mengalokasikan anggaran pembangunan di bidang perumahan, bidang kawasan permukiman dan bidang pertanahan sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan.
4. Sebagai pedoman bagi seluruh aparat dan jajaran di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan infrastruktur daerah.
5. Sebagai pedoman untuk memantapkan peran Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan guna menyusun Rencana Kinerja Tahunan dan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur daerah.
6. Sebagai acuan dalam meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektor serta kemitraan dengan stakeholders pembangunan infrastruktur di kabupaten Pesisir Selatan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017-2021 adalah untuk dijadikan landasan/pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan, penguatan peran para *stakeholders* dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, serta sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 - 2021 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan.
- 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika penulisan.
- Bab II : Gambaran Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
- 2.1 Tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan
 - 2.2 Sumber daya Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan
 - 2.3 Kinerja pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan
 - 2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
- Bab III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Perrumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
- 3.1 Identifikasi masalah berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan
 - 3.2 Telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih
 - 3.3 Telaahan Renstra Kementerian PUPR dan Renstra Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat
 - 3.4 Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Pesisir Selatan
 - 3.5 Penentuan Isu-isu strategis di bidang perumahan rakyat, bidang kawasan permukiman dan bidang pertanahan.
- Bab IV : Tujuan dan Sasaran.
- 4.1 Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan
- Bab V : Startegis dan Arah Kebijakan.

- Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan.
- Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
- BabVIII : Penutup

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

2.1.1 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 55 tahun 2016 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas pokok Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan sesuai pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 55 tahun 2016, adalah Melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai fungsi :

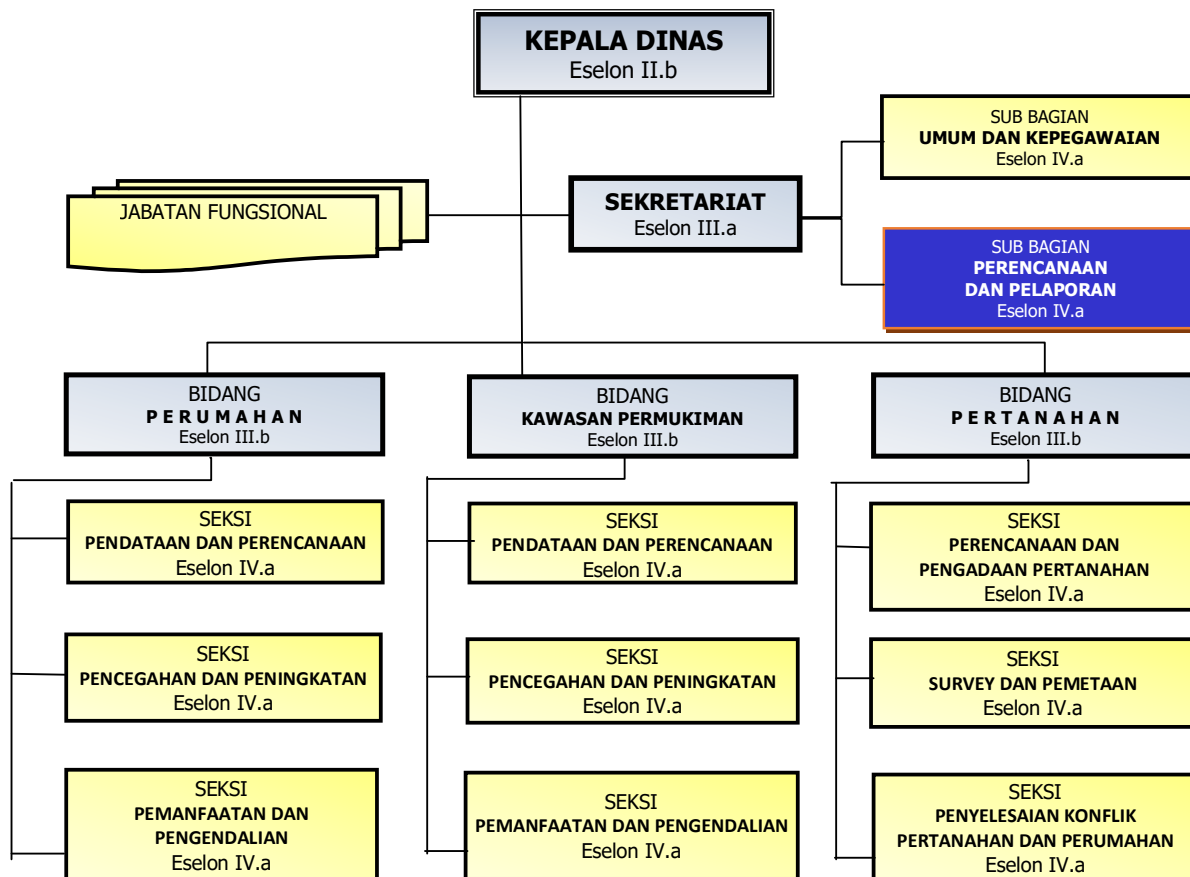
- a. perumusan kebijakan urusan perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas urusan perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan Tersebut, susunan organisasi dinas ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah nomor 55 tahun 2016 **tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai berikut :**

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahi 2 (dua) Sub Bagian sebagai berikut :
 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
- c. Bidang Perumahan, membawahi 3 (tiga) Seksi sebagai berikut :
 1. Seksi Pendataan dan Perencanaan Perumahan;
 2. Seksi Penyediaan dan Pelaksanaan Perumahan; dan
 3. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Perumahan.
- d. Bidang Kawasan Permukiman, membawahi 3 (tiga) Seksi, sebagai berikut :
 1. Seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman;
 2. Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman; dan
 3. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman.
- e. Bidang Pertanahan, membawahi 3 (tiga) Seksi, sebagai berikut :
 1. Seksi Perencanaan dan Pengadaan Pertanahan;
 2. Seksi Survey dan Pemetaan; dan
 3. Seksi Penyelesaian Konflik Pertanahan dan Perumahan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan digambarkan sebagai berikut :



2.1.3 TUGAS, FUNGSI UNIT KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Tugas dan fungsi dari masing – masing unit kerja pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan ditetapkan melalui Peraturan bupati nomor 55 tahun 2016 tentang penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan. Secara rinci, tugas pokok dan fungsi masing – masing unsur pejabat pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah sebagai berikut :

KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan mengatur penyelenggaraan urusan Pengelolaan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang akuntabel untuk mendukung keberhasilan pembangunan daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan pada urusan penyelenggaraan dinas sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- b. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas yang meliputi sekretariat, bidang perumahan, bidang kawasan permukiman, dan bidang pertanahan, serta jabatan fungsional umum.
- c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab dinas;
- d. pengawasan atas pelaksanaan tugas pada dinas;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di lingkup dinas;
- f. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan pengembangan infrastruktur perumahan kawasan permukiman dan pertanahan;
- g. pemberian dukungan pada penelitian dan pengembangan urusan perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan, serta sumberdayanya;
- h. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia pada urusan perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsinya.

SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam rangka melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas bidang dan pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretaris mempunyai fungsi :

- a. koordinasi kegiatan bidang-bidang di lingkungan dinas;
- b. koordinasi pendataan, rencana, program, dan penganggaran dinas serta informasi publik;
- c. pemberian dukungan administrasi yang meliputi pelayanan umum, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama dan hubungan masyarakat, inventarisasi barang dan aset, pengarsipan dan dokumentasi dinas;
- d. penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BIDANG PERUMAHAN

Bidang Perumahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam rangka melaksanakan pendataan, perencanaan, penyediaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di bidang perumahan sesuai dengan ketentuan perundangan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perumahan mempunyai fungsi :

- a. pendataan dan perencanaan bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara, rumah komersil dan bantuan rumah swadaya;
- b. penyediaan dan pelaksanaan bidang perumahan rumah umum, rumah khusus, rumah negara, rumah komersil dan bantuan rumah swadaya; dan
- c. pemantauan dan evaluasi bidang perumahan rumah umum, rumah khusus, rumah negara, rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.

BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam rangka melaksanakan pendataan, perencanaan, pencegahan, peningkatan kualitas, pemanfaatan, dan pengendalian kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan perundangan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

- a. pendataan dan perencanaan kawasan permukiman;
- b. pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman dan kawasan permukiman kumuh; dan
- c. pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman dan prasarana sarana utilitas umum perumahan.

BIDANG PERTANAHAN

Bidang Pertanahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam rangka melaksanakan perencanaan, pengadaan pertanahan, survey, pemetaan, penyelesaian konflik pertanahan dan perumahan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Pertanahan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan dan pengadaan pertanahan;
- b. pelaksanaan survey dan pemetaan; dan
- c. penyelesaian konflik pertanahan dan perumahan

2.2 SUMBER DAYA DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

2.2.1 SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsinya Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan didukung dengan sumber daya manusia dengan personil kepegawaian sebanyak 27 orang terdiri atas :

- a. Golongan IV sebanyak 2 (dua) orang
- b. Golongan III sebanyak 20 (dua puluh) orang
- c. Golongan II sebanyak 5 (lima)
- d. Pegawai Non PNS sebanyak 20 (dua puluh) orang

Berdasarkan tingkat pendidikannya, PNS pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagian besar adalah S1 (18 orang) diikuti oleh berpendidikan SLTA/STM/SMEA (6 orang) dan Pasca Sarjana (3 orang). Sebaran PNS berdasar jenjang pendidikan diperlihatkan pada gambar 2.1

Gambar 2.1

SUSUNAN PNS DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN MENURUT JENJANG PENDIDIKAN, TAHUN 2017

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Pasca Sarjana (S2)	3 orang
2	Sarjana D4/S1	18 orang
3	Diploma 3	-
4	SLTA/STM/SMEA	6 orang
6	JUMLAH	27 orang

2.2.2 SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG

Perlengkapan organisasi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan ini terdiri atas perlengkapan berupa Kantor, Mushalla, Kendaraan Operasional Dinas, serta Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lainnya. Perlengkapan kantor terdiri atas 2 (dua) blok kantor Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan luas lahan m² dan bangunan seluas m², terletak pada jalan Pahlawan Rawang Painan. Bangunan kantor tersebut terdiri dari 1 ruangan Kepala Dinas, 1 ruangan Sekretariat, 1 ruangan Bidang Perumahan, 1 ruangan Bidang Kawasan Permukiman, 1 ruangan Bidang Pertanahan, 1 ruang pelayanan, 1 ruangan gudang, 1 musholla dan tempat wudhu. Disamping bangunan kantor tersebut, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan juga dilengkapi dengan peralatan kendaraan Dinas. Untuk lebih jelasnya perlengkapan yang terdapat pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan diperlihatkan pada tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2
NAMA DAN JENIS SARANA DAN PRASARANA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN,
TAHUN 2017

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH
A	Peralatan dan Mesin	
1	Alat – alat Angkutan (Mobil Dinas)	2 unit
2	Kendaraan Roda Dua	6 unit
B	Gedung dan Bangunan	
1	Bangunan Gedung Kantor	2 unit
2	Bangunan Ruang Pelayanan	1 unit
3	Bangunan Gudang	1 unit
4	Bangunan Mushalla dan Tempat Wudhu	1 unit

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Pendanaan pembangunan infrastruktur di kabupaten Pesisir Selatan masih terbatas, minimnya anggaran pemeliharaan, permohonan kegiatan/kebutuhan masyarakat lebih besar dibanding kemampuan daerah serta Standar Pelayanan Minimal (SPM) belum sepenuhnya terimplementasi. Sementara disisi lain untuk memenuhi sasaran mutu pelayanan infrastruktur terutama penyediaan air bersih, penurunan luasan kawasan kumuh serta penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sudah tidak bisa ditunda lagi.

Berikut gambaran kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun anggaran 2011 -2015 yang sebelumnya masih berada pada Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman dan Bagian Pemerintahan di Sekretariat Daerah Kab. Pesisir Selatan:

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kab. Pesisir Selatan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian Pada Tahun ke -				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Rumah tangga pengguna air bersih										64	43,78	84,66	84,95					
2	Lingkungan permukiman kumuh											2,74	12,88	12,88					
3	Rumah layak huni										77	94,1	74,91	75,56					
4	Pengadaan Tanah									10	7	12	10	7					

Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kab. Pesisir Selatan

Uraian	Anggaran pada tahun ke - Rp (000)					Realisasi anggaran pada tahun ke - Rp (000)					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke -					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	301.312	303.398,4	529.440,65	1.097.064,2	1.823.748,4	269.159,1	292.222,9	521.123,1	859.106,8	1.736.699,6	0.89	0.96	0.98	0.78	0.95		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.887.590	3.045.984,9	10.364.237,9	11.409.239	17.526.623	2.858.606,3	3.001.917,4	10.214.459,4	11.323.097	17.308.793,4	0.98	0.98	0.98	0.99	0.98		
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	19.585	29.950	29.769	65.602	82.600	19.455	22.668	29.769	65.552,6	82.600	0.99	0.77	1	0.99	1		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	25.000	25.000	25.000	45.200	48.640	25.000	24.850	24.500	34.050	48.640	1	0.99	0.98	0.75	1		
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	2.783.702	1.229.700,6	19.384.397	18.383.177,9	50.340.562,6	2.596.843	788.782	14.982.792,6	14.652.553,7	47.627.536,5	0.93	0.64	0.77	0.79	0.9		
Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	20.392.065,4	22.854.603,4	30.963.073,2	60.663.045,1	42.897.179	20.381.153,9	22.512.519,1	30.689.490,6	60.254.970,1	41.236.929,3	0.9	0.98	0.99	0.99	0.96		
Program Saluran Drainase / Gorong-gorong		654.956,5	328.848,5	475.000	2.326.750		555.283,6	328.848,5	460.184,5	2.272.825		0.84	1	0.96	0.97		
Program Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh		150.000			6.085.709,2		97.323,9			4.726.436,9		0.64			0.77		
Program pembangunan infrastruktur	17.250.336,1	14.964.860,7	20.839.747	18.575.137,9	28.375.342,9	15.506.915,6	14.824.226,8	20.013.925,9	18.031.169,4	27.394.361,1	0.89	0.99	0.96	0.97	0.96		
Program Perdesaan/ Nagari	30.000	15.000	15.000	15.005	9.385,7	30.000	14.900	11.675	2.589,8	9.340,2	1	0.99	0.77	0.62	0.99		
Program Pengaturan Jasa Konstruksi	1.163.413,6	459.412,3				1.157.166,6	459.410,8				0.99	0.99					
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Pendidikan																	
Program Pembangunan Sarana & Prasarana Peribadatan	3.690.790,4	2.088.015,5	350.000			3.662.307,4	2.067.774,3	347.494			0.99	0.99	0.99				
Program Monitoring, Evaluasi, Koordinasi dan Pelaporan	473.460,5	1.072.148,8	1.223.153	713.461,7	1.509.468,575	473.096,9	1.061.043,8	1.176.427	554.624,06	1.343.073,54	0.99	0.98	0.96	0.77	0.88		
Program Pengembangan data/informasi		75.000					74.984,5					0.99					
Program Peningkatan jalan	2.079.031,6					2.024.074,3					0.97						
Program dana Penguatan	13.500.000	4.114.389,6				9.369.736,3	4.111.506,6				0.69	0.99					

Infrastruktur dan Prasarana Daerah															
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kabinamar	202.096,	1.656.381,9	315.970	300.538	331.374	174.551	1.635.145,8	264.032,2	278.541,7	308.870	0.86	0.98	0.83	0.92	0.93
Program dukungan Dana Untuk Program Bersama	876.823	4.557.123,5	8.711.879,5	2.432.031	2.332.449	876.515,6	4.421.950,3	8.582.180,8	2.193.591,5	1.793.339,8	0.99	0.97	0.98	0.90	0.76
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pertamanan	1.088.754	2.036.031,1	4.883.973,6	2.851.771,8	1.042.830,800	1.082.196,5	1.557.559,5	4.590.786,8	2.806.244,8	1.019.342,700	0.99	0.76	0.93	0.98	0.97
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah	1.378.939	1.309.333,8	2.290.836,6	2.780.692,6	3.219.624,1	1.337.767,3	1.309.326,3	2.242.706,7	2.649.393,1	3.191.956,5	0.97	0.99	0.97	0.95	0.99
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah	180.000					178.774,5					0.99				
Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	716.716,8	450.721,	485.011,5	345.469,3	378.210	712.405,8	449.975,6	483.967,5	335.182,6	372.772	0.99	0.99	0.99	0.97	0.98
Program Pengadaan, Peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata		9.990		5.165.818,5	3.002.693,5	9.870		4.037.875,1	2.152.012,2		0.98		0.78	0.71	
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya			4.362.498	7.556.757	10.670.744			4.326.111,4	7.079.735,3	9.772.613,5		0.99	0.93	0.91	
Program Pengembangan dan Pengelolaan Ruang Pemasaran			70.857,6		1.999.899,3		60.611,4		1.891.484,8			0.85		0.95	
Program Pengembangan dan Pengelolaan Ruang Pemasaran					41.546				41.546					1	
Program Pengembangan dan Pengelolaan Ruang Pemasaran															

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah :

- Tersedianya sarana dan prasarana kerja yaitu gedung kantor, sarana transportasi dan peralatan kantor
- Adanya program-program dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan permukiman

- c. Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan sehingga luas kawasan kumuh yang ada di kabupaten Pesisir Selatan berkurang sehingga tercipta lingkungan permukiman yang sehat dan tertata
- d. Adanya keterpaduan pengembangan permukiman dengan sektor lain untuk lebih mendorong terwujudnya permukiman yang layak huni dan berkelanjutan
- e. Meningkatnya kompetensi aparatur daerah di bidang pertanahan
- f. Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan rencana pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga tersedia rencana kebutuhan tanah secara lengkap.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau di kedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang

III.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Perencanaan strategis Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan 2017 – 2021, adalah perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dari pembangunan tahun – tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

III.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH.

3.2.1 VISI

Visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021 merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan memperhatikan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pesisir Selatan, yaitu

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN YANG MANDIRI, UNGGUL, AGAMIS DAN SEJAHTERA”

yang dijabarkan sebagai berikut :

- Mandiri : berdiri sendiri yaitu kondisi dimana daerah dapat memenuhi kebutuhan pembangunan dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki daerah secara optimal
- Unggul : masyarakat yang memiliki kemampuan berfikir, beraktualisasi dan memiliki kapasitas inovatif dan kreatif sehingga menjadi masyarakat yang unggul
- Agamis : suatu kondisi masyarakat dapat mempelajari, memahami, melaksanakan dan mengamalkan ajaran agamanya dalam tatanan kehidupan sehari-hari serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan adat.
- Sejahtera : perlu sejumlah program akselerasi untuk bisa mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pesisir Selatan terutama dibidang Pendidikan, Kesehatan, dan meningkatkan daya beli masyarakat

3.2.2 MISI

Berkaitan dengan pernyataan visi pembangunan lima tahun kedepan, maka untuk **MEWUJUDKAN MASYARAKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN YANG MANDIRI, UNGGUL, AGAMIS DAN SEJAHTERA** dilaksanakan melalui 5 (lima) Misi yaitu :

1. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah.
3. Mewujudkan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan mengembangkan nilai-nilai budaya ABS-SBK.
4. Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan.
5. Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obat terlarang.

Dari ke lima misi Kabupaten Pesisir Selatan tersebut di atas, maka **misi kedua** adalah misi yang harus diemban Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Misi kedua tersebut untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah

Visi: <i>Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Yang Mandiri, Unggul, Agamis Dan Sejahtera</i>			
MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah	1. Mewujudkan pembangunan infrastruktur ekonomi dan infrastruktur social dalam mendukung sektor unggulan daerah.	1. Meningkatnya Kuantitas dan kualitas infrastruktur ekonomi secara berkelanjutan	1. Luas Kawasan Kumuh yang tertata

3.2.3 Program Pembangunan

Sebagai upaya mewujudkan Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan 2016–2021, maka program-program yang menjadi prioritas unggulan terkait Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan berdasarkan visi, misi bupati terpilih adalah sebagai berikut:

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PEMBANGUNAN
1	2	3	4
Meningkatnya Kuantitas dan kualitas infrastruktur ekonomi secara berkelanjutan	Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan	Meningkatkan pembangunan perumahan dan permukiman	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman

III.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Telaahan terhadap Renstra Kementrian dan Renstra Daerah diperlukan dalam upaya untuk menyusun daftar penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan kabupaten Pesisir Selatan yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi, dan dikaitkan dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan adalah satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai keterkaitan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pembangunan infrastruktur pekerjaan umum diselenggarakan dalam rangka mencapai visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015 – 2019 :”Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Handal dalam Mendukung Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandas Gotong Royong”.Infrastruktur pekerjaan Umum yang handal diartikan sebagai tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang produktif dan cerdas, berkeselamatan mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera.

Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang handal secara lebih rinci diperlukan untuk mendukung agenda prioritas nasional antara lain :

1. Untuk meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional

2. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor – sektor strategis ekonomi domestik
3. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
4. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah – daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
5. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah
6. Menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian indonesia sebagai negara kepulauan
7. Serta untuk melindungi segenap bangsa dan meberikan rasa aman pada seluruh warga negara

Misi untuk mecapai visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015–2019,yaitu:

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumberdaya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor – sektor ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistim logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia indonesia sejalan dengan prinsip *“infrastruktur untuk semua”*
4. Mempercepat infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan perdesaan dalam kerangka NKRI
5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat

III.4 TELAAHAN RTRW DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS KABUPATEN PESISIR SELATAN

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Perangkat Daerah. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Perangkat Daerah dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Perangkat Daerah dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Tujuan penataan ruang wilayah adalah mewujudkan keterpaduan ruang yang memberikan kesejahteraan masyarakat kabupaten Pesisir Selatan sampai tahun 2030 melalui konservasi, pengembangan, ekonomi berbasis pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pariwisata dan mitigasi bencana secara berkelanjutan.

Dalam penelaahan RTRW, aspek yang akan ditelaah adalah meliputi rencana struktur tata ruang, struktur tata ruang saat ini, rencana pola ruang, pola ruang saat ini, dan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah.

Rencana pengembangan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 huruf j RTRW kab. Pesisir Selatan Tahun 2010 – 2030 berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 7 tahun 2011, meliputi permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan dikembangkan diseluruh wilayah kabupaten yang memenuhi kriteria sebagai permukiman yang terdiri dari :

- a. Kawasan Permukiman Perkotaan, meliputi :
 1. Kawasan Kota besar terdapat di Kota Painan;
 2. Kawasan Kota menengah di Tapan dan Kota Terpadu Mandiri (Lunang);
 3. Kawasan Kota kecil di ibu kota kecamatan;
- b. Kawasan Permukiman Perdesaan, meliputi :
 1. Pemukiman pusat pertumbuhan nagari;
 2. Pemukiman kampung; dan
 3. Pemukiman dusun;

Perwujudan pengembangan sistem prasarana perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui :

- a. Pembangunan perumahan untuk kebutuhan penduduk di Pesisir Selatan sampai dengan tahun 2030 dengan program pembangunan perumahan swadaya yang tahan gempa;
- b. Pengembangan prasarana dan sarana perumahan, berupa jalan poros, jalan lingkungan, jalan setapak, dan drainase yang tersebar di seluruh kecamatan
- c. Penyediaan prasarana dan sarana air minum terutama pada kawasan rawan air minum di perkotaan dan perdesaan;
- d. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada setiap rumah sakit;
- e. Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah skala kabupaten di Kecamatan Koto XI Tarusan, IV Jurai, Lengayang, Pancung Soal, Basa Ampek Balai Tapan dan Lunang Silaut;
- f. Pembangunan TPST di seluruh pusat pelayanan kawasan maupun lokal (PPK dan PPL).

Pengembangan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

- a. Pengembangan kawasan permukiman perdesaan dilakukan melalui :
 1. Pengembangan kota kecil kawasan pusat pertumbuhan.
 2. Pengembangan sarana prasarana kawasan tertinggal.
 3. Pengembangan dan pengamanan pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan laut
 4. Revitalisasi kawasan tradisional/bersejarah, kawasan pariwisata dan kawasan lain yang menurun kualitasnya yang tersebar di Kecamatan Koto XI Tarusan, Bayang Utara, IV Jurai, Inderapura dan Lunang Silaut.
 5. Pengembangan sistem jaringan transportasi yang mendukung alur produksi koleksi distribusi antar kota, antar wilayah dan antara perkotaan dan perdesaan.
 6. Pengembangan prasarana dan sarana kawasan perdesaan lainnya.

b. Pengembangan kawasan permukiman perkotaan yang tersebar di Painan, Tapan dan kota kecamatan lainnya dilakukan melalui :

1. Percepatan penyediaan perumahan melalui kegiatan : Penyediaan Koperasi Pengkreditan Rumah (KPR) dan Rumah Siap Huni (RSH) bersubsidi, Pengembangan perumahan swadaya dan Pengembangan Kasiba/Lisiba.
2. Penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan perkampungan nelayan, kegiatan ini ditujukan untuk kawasan yang memiliki lingkungan permukiman yang kurang sehat serta kondisi perumahan yang kurang layak pada kota-kota yang menjadi pusat pengembangan.
3. Revitalisasi kawasan tradisional/etnis/ bersejarah yaitu kawasan yang mempunyai bangunan bersejarah yang bernilai atau bermakna penting
4. Peningkatan penyehatan lingkungan permukiman.
5. Pengembangan prasarana dan sarana kawasan cepat tumbuh perkotaan, seperti Kota Terpadu Mandiri di Kecamatan Lunang Silaut.

Berdasarkan visi dan misi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan, maka ditetapkan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan pembangunan selama lima tahun kedepan antara lain : ***Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan, Ketersediaan rumah tidak layak huni, dan terwujudnya kepastian hukum pemilikan tanah di kabupaten Pesisir Selatan.***

III.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Pesisir Selatan, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai Dinas yang bertanggung jawab atas Penataan permukiman kumuh, Ketersediaan rumah tidak layak huni, dan terwujudnya kepastian hukum pemilikan tanah di kabupaten Pesisir Selatan yang berkeinginan untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terutama dalam bidang sarana dan prasarana perumahan, permukiman dan pertanahan. Tingkat pelayanan kepada masyarakat diharapkan mengalami peningkatan yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang secara komprehensif akan melibatkan pihak-pihak terkait/ berkepentingan (*stakeholder*).

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu – isu strategis yang ada pada Dinas Perumahan Rakyat

Kawasan Permukiman dan Pertanahan kabupaten Pesisir Selatan antara lain sebagai berikut :

1. Isu strategis di Bidang Perumahan

- Masih banyaknya rumah yang belum layak huni
- Belum adanya data base perumahan
- Kondisi sarana dan prasarana aparatur pemerintah daerah perlu ditingkatkan guna kelancaran terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (Relokasi Pembangunan rumah Dinas Bupati)

2. Isu Strategis di Bidang Kawasan Permukiman

- Masih banyaknya kawasan permukiman kumuh perkotaan yang belum tertangani
- Menurunnya kualitas lingkungan permukiman sehingga tumbuh kawasan kumuh di perkotaan;
- Belum tersedianya peta masalah yang terukur tentang lingkungan dan kawasan permukiman kumuh untuk fasilitas penanganan kawasan kumuh

3. Isu Strategis di Bidang Pertanahan

- Penyelesaian masalah konflik pertanahan
- Tersedianya pemetaan pemanfaatan tanah
- Tersertifikatkannya tanah pemerintah daerah Kab. Pesisir Selatan

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Dalam merumuskan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2017 – 2021 dilakukan melalui penelaahan visi dan misi secara mendalam sehingga tersusun tujuan yang sinkron dengan visi dan misi tersebut.

Berdasarkan visi dan misi tersebut diatas, maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : Terwujudnya infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan, dan Terwujudnya tertib administrasi dan tata kelola pertanahan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Selanjutnya rumusan sasaran yang hendak diraih sesuai dengan visi, misi dan tujuan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni.
2. Meningkatnya kawasan permukiman layak huni dan berkelanjutan.
3. Terwujudnya kepastian hukum kepemilikan tanah di kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel T-C.25.

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat
Kawasan Permukiman dan Pertanahan**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	Terwujudnya infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan		Persentase Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang layak huni dan berkelanjutan					
		a. Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni	Rasio Rumah Layak Huni	0,2134	0,2178	0,2211	0,2233	0,2255
		b. Meningkatnya kawasan permukiman layak huni dan berkelanjutan	Rasio Permukiman Layak Huni	96,80	96,82	96,95	97,09	97,25
2	Terwujudnya tertib administrasi dan tata kelola pertanahan di Kabupaten Pesisir Selatan		Persentase data base pertanahan yang valid	46%	49%	53%	57%	62%
		a. Terwujudnya kepastian hukum pemilikan tanah di kabupaten Pesisir Selatan	Persentase luas lahan yang bersertifikat	46%	49%	53%	57%	62%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran didalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan straregi. Strategi adalah langkah – langkah berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Dari analisis lingkungan strategis yang telah dilakukan maka dapat disusun strategi dan kebijakan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten pesisir selatan sebagai berikut :

- 1) Sasaran 1 : Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni
Strategis : Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, meningkatkan kesesuaian pembangunan perumahan dengan perencanaan, meningkatkan ketersediaan rumah layak bagi aparatur.
Kebijakan : Dengan melaksanakan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat Berpenghasilan rendah (MBR) di Kab. Pesisir Selatan, melakukan kevalidan data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan pembangunan baru (*Backlog*) Perumahan, pelaksanaan pembangunan perumahan yang sesuai standar teknis, meningktanya pengendalian dan pengawasan pembangunan perumahan, pembangunan rumah bagi aparatur, dan fasilitasi penyediaan rumah layak bagi aparatur di kabupaten Pesisir Selatan.
- 2) Sasaran 2 : Meningkatkan kawasan permukiman layak huni dan berkelanjutan
Strategis : Meningkatkan penataan kawasan permukiman dan berkurangnya luas kawasan kumuh.
Kebijakan : Pencegahan kawasan kumuh dan Pencegahan penurunan kualitas kawasan permukiman dengan melaksanakan

sosialisasi, penhgendalian dan pengawasan, peningkatan kualitas kawasan kumuh dan peningkatan kualitas kawasan permukiman dengan melaksanakan perbaikan dan pembangunan pada tujuh indikator kawasan kumuh(bangunan tidak teratur, jalan lingkungan yang tidak layak, drainase, pengelolaan air limbah, persampahan, air bersih dan fasilitas pemadam kebakaran), dan tersedianya dokumen perencanaan kawasan.

- 3) Sasaran 3 : Terwujudnya kepastian hokum pemilikan tanah di Kabupaten Pesisir Selatan.
- Strategis : Meningkatkan pemetaan pemanfaatan lahan dan meningkatnya sertifikat tanah pemerintah daerah Pesisir Selatan.
- Kebijakan : Terlaksananya inventarisasi tanah, melakukan penerbitan rekomendasi ijin pertanahan, terfasilitasinya ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, serta terfasilitasinya konflik pertanahan di kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi	Terwujudnya masyarakat kabupaten Pesisir Selatan yang mandiri, unggul, agamis dan sejahtera		
Misi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur social yang terkait dengan sector unggulan daerah		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan	1.Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni	1.1.Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	1.1.1.Meningkatnya perbaikan RTLH dan Pembangunan rumah layak huni bagi MBR 1.1.2. Meningkatnya kevalidan data RTLH dan Backlog Perumahan
		1.2.Meningkatkan kesesuaian pembangunan perumahan dengan perencanaan	1.2.1. Meningkatnya pelaksanaan pembangunan perumahan yang sesuai standar teknis 1.2.2. Meningkatnya pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pembangunan perumahan 1.2.3. Meningkatnya kualitas data dan perencanaan bidang perumahan
		1.3. Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni bagi aparatur	1.3.1. Pembangunan rumah aparatur 1.3.2. Fasilitasi penyediaan rumah layak bagi aparatur
	2.Meningkatnya kawasan permukiman layak huni dan berkelanjutan	2.1.Berkurangnya luas kawasan kumuh	2.1.1.Pendataan dan perencanaan 2.1.2. Pencegahan kawasan kumuh 2.1.3. Peningkatan kualitas kawasan kumuh
		2.2.Meningkatkan penataan kawasan permukiman	2.2.1.Pendataan dan perencanaan 2.2.2. Pencegahan penurunan kualitas kawasan permukiman 2.2.3. Peningkatan kualitas kawasan permukiman
Terwujudnya tertib administrasi dan tata kelola pertanahan di Kab. Pesisir Selatan	1. Terwujudnya kepastian hukum pemilikan tanah di Kab. Pesisir Selatan	1.1. Meningkatnya pemetaan pemanfaatan lahan	1.1.1. Terlaksananya inventarisasi pertanahan 1.1.2. Penerbitan rekomendasi ijin lokasi
		1.2. Meningkatnya sertifikat tanah pemerintah daerah	1.2.1. Fasilitasi dan penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan 1.2.2. Terfasilitasi konflik pertanahan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan Visi-Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, serta Tujuan dan Sasaran Strategis yang telah dirumuskan, diperoleh strategis untuk mencapainya yaitu melalui 21 (Dua Puluh Satu) Program Urusan yang dilaksanakan oleh Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Kawasan Permukiman, serta Bidang Pertanahan.

Kedua puluh satu program tersebut merupakan merupakan urusan wajib dan non urusan yang meliputi Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Urusan Pekerjaan Umum dan urusan Pertanahan dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
4. Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
5. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya
6. Program Pengembangan Perumahan
7. Program Lingkungan Sehat Perumahan.
8. Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong – Gorong
9. Program Pembangunan Jalan dan jembatan.
10. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh
11. Program Penataan Penguasaan Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
12. Program Penyelesaian Konflik – Konflik Pertanahan.
13. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.
14. Program Penataan Bangunan dan Lingkungan.
15. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman

16. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
17. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan.
18. Program Perbaikan Perumahan akibat bencana alam/sosial.
19. Program Pembangunan Sistem Informasi data base jalan dan jembatan
20. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan
21. Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah

Masing-masing program pembangunan lebih lanjut dijabarkan ke dalam berbagai kegiatan. Pencapaian masing-masing kegiatan diukur dengan indikator keluaran Target Rencana Program Kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran digambarkan pada tabel dibawah ini.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Peraturan Menteri Negara PAN Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah. Tujuan Penetapan IKU untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil utama dari unit-unit kerja (Bidang) di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah mencerminkan indikator impact dari seluruh sasaran strategis Dinas yang merupakan gabungan, perampatan dan sinergitas dari seluruh indikator kinerja utama (outcome) unit-unit Eselon III (Bidang) adalah sebagai berikut: Rasio rumah layak huni, Persentase permukiman yang tertata, Cakupan lingkungan perumahan umum yang sehat dan aman, serta Luas lahan Pemerintah Daerah yang tersedia untuk pembangunan.

Tabel 15.

Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS
1	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
a.	Rasio Rumah Layak Huni	$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah Penduduk}}$
b.	Rasio Permukiman Layak Huni	$\frac{\text{Luas permukiman layak huni}}{\text{Luas wilayah permukiman}}$
2	Pertanahan	
a.	Persentase luas lahan yang bersertifikat	$\frac{\text{Luas lahan yang bersertifikat}}{\text{Luas wilayah}} \times 100\%$

Permendagri Nomor 86 tahun 2017 lampiran I menggambarkan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari setiap aspek, fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Bidang urusan yang menjadi kewenangan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan yaitu Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan indikator kinerja sebagai berikut pada Tabel 16.

Tabel 16.
Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Dinas
Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman
dan Pertanahan berdasarkan Permendagri
86 tahun 2017

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS
1	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
a.	Rasio Rumah Layak Huni	$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah Penduduk}}$
b.	Rasio Permukiman Layak Huni	$\frac{\text{Luas permukiman layak huni}}{\text{Luas wilayah permukiman}}$
c.	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	$\left(\frac{\text{Jumlah seluruh rumah layak huni disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah rumah disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}} \right) \times 100\%$
d.	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	$\left(\frac{\text{Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu}}{\text{jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu}} \right) \times 100\%$
e.	Persentase permukiman yang tertata	$\left(\frac{\text{Luas area permukiman tertata/luas area permukiman keseluruhan}}{\text{Luas area permukiman tertata/luas area permukiman keseluruhan}} \right) \times 100\%$
f.	Persentase lingkungan permukiman kumuh	$\left(\frac{\text{Luas lingkungan permukiman kumuh/luas wilayah}}{\text{Luas lingkungan permukiman kumuh/luas wilayah}} \right) \times 100\%$
g.	Persentase luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan	$\left(\frac{\text{Luasan permukiman kumuh yang tertangani/luas permukiman kumuh}}{\text{Luasan permukiman kumuh yang tertangani/luas permukiman kumuh}} \right) \times 100\%$
h.	Proporsi Rumah tangga kumuh perkotaan	$\left(\frac{\text{Jumlah rumah tangga kumuh perkotaan/ jumlah seluruh rumah}}{\text{Jumlah rumah tangga kumuh perkotaan/ jumlah seluruh rumah}} \right) \times 100\%$
i.	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	$\left(\frac{\text{Jumlah lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu tertentu}}{\text{jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu Tertentu}} \right) \times 100\%$
2	Pertanahan	
a.	Persentase luas lahan yang bersertifikat	$\frac{\text{Jumlah Luas lahan yang bersertifikat}}{\text{Jumlah Luas wilayah}} \times 100\%$
b.	Penyelesaian kasus tanah negara	$\frac{\text{Jumlah kasus yang diselesaikan}}{\text{Jumlah kasus yang terdaftar}} \times 100\%$

c.	Penyelesaian ijin lokasi	$\frac{\text{Jumlah ijin lokasi} \times 100\%}{\text{Permohonan ijin lokasi}}$
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
a.	Persentase kawasan permukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	$\frac{(\text{Jumlah kawasan permukiman penduduk yang belum dilalui kendaraan roda 4} / \text{jumlah seluruh kawasan permukiman penduduk}) \times 100\%}{}$
b.	Persentase areal kawasan kumuh	$\frac{\text{Luas kawasan kumuh} \times 100\%}{\text{Luas wilayah}}$

Sumber: Permendagri No 86 tahun 2017

Sedangkan indikator kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan jika dikaitkan dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel T-C. 28.

Indikator Kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

NO	Indikator kinerja program (outcome)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Ket.
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Rasio Rumah Layak Huni		0,2134	0,2178	0,2211	0,2233	0,2255	0,2255	
2	Rasio Permukiman Layak Huni		96,80	96,82	96,95	97,09	97,25	97,25	
3	Capaian Ketersediaan Rumah Layak Huni		94,02%	93,88%	94,45%	94,89%	95,30%	95,30%	
4	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau		2,19%	32,05%	35,38%	50%	100%	100%	
5	Persentase Permukiman yang Tertata		96,74%	96,82%	96,95%	97,08%	97,22%	97,22%	
6	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh		0,0845 %	0,0824 %	0,0789 %	0,0754 %	0,0720 %	0,0720 %	

7	Persentase Luasan Permukiman Kumuh Dikawasan Perkotaan		3,87%	4,15%	4,33%	4,52%	4,74%	4,74%	
8	Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan		19,67%	17,79%	15,89%	13,99%	12,09%	12,09%	
9	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman Yang Didukung dengan PSU		5,88%	11,76%	17,65%	17,65%	17,65%	70,59%	
10	Persentase Luas Lahan Yang Bersertifikat		46%	49%	53%	57%	62%	62%	
11	Penyelesaian Kasus Tanah Negara		8	10	10	10	10	10	
12	Penyelesaian Ijin Lokasi		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
13	Persentase kawasan Permukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4								
14	Persentase Areal Kawasan Kumuh		0,0845 %	0,0824 %	0,0789 %	0,0754 %	0,0720 %	0,0720 %	

BAB VIII

PENUTUP

Demikian rancangan rencana strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan disusun sebagai arahan pelayanan dinas dalam 5 (lima) tahun mendatang untuk dijadikan pedoman bagi tiap-tiap bidang di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan, anggaran dinas, rencana program, dan rencana prioritas kegiatan.

Peran serta dari semua pihak penyelenggara pembangunan akan turut menentukan pencapaian target kinerja dalam mendukung Visi dan Misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih sebagaimana telah disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) periode tahun 2017-2021. Dalam hal ini renstra dapat digunakan sebagai dasar penilaian atau evaluasi atas kinerja dinas dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, upaya maksimal serta kesungguhan dari semua pihak sangat diperlukan agar seluruh rencana ini dapat diwujudkan.

Painan, Juni 2018

KEPALA DINAS

Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Pesisir Selatan,



MUKHRIDAL, SH
NIP. 19640128 199309 1 001